

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
BATAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN BULANG)**

SKRIPSI



**Oleh:
Yola Paramita
141010005**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
BATAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN BULANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Yola Paramita
141010005**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di Perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Februari 2019

Yang membuat pernyataan

Yola Paramita
141010005

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM (STUDI
KASUS DI KECAMATAN BULANG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana

Oleh:

Yola Paramita

141010005

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 14 Februari 2019

Ulima Harma, S.AP., M.A.P.

Pembimbing

ABSTRAK

Rumah Tidak Layak Huni merupakan suatu program yang dilaksanakan di Kota Batam demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bagi setiap warga masyarakat yang dikatakan kurang mampu atau miskin. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bulang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaannya sudah dikatakan berhasil di jalankan dengan faktor pendukung terlaksananya program pembangunan adalah sumberdaya manusianya yang ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dan mendapatkan bantuan dana dari APBD Kota Batam. Tetapi masih ada hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni seperti, kurangnya tukang yang ahli dalam pembangunan rumah tidak layak huni, kondisi geografis yang letak pelaksanaannya di tepi laut, mahalnya biaya transportasi dalam mengangkut bahan material, serta kurang jelasnya pedoman dalam mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni ini. Diharapkan kepada pihak pelaksana agar dapat lebih mensosialisasikan lagi apa saja syarat yang harus dipenuhi, bagaimana prosedurnya, bagaimana cara pengajuannya, dalam mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan, Rumah Tidak Layak Huni

ABSTRACT

Non-Livable Houses is a program implemented in Batam City to create community welfare and can provide a decent place of residence for every citizen who is said to be poor or poor. This study aims to see how the implementation of the House development program is not eligible for habitation and what are the inhibiting and supporting factors of the implementation of the Uninhabitable House construction program in Bulang District. This research is a qualitative research with a descriptive approach, data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The results of this study are that the implementation has been said to have been successfully implemented with supporting factors in the implementation of the development program is human resources who participated in the implementation of development programs for Unqualified Houses, and received funding from the Batam City APBD. But there are still obstacles in the implementation of uninhabitable housing development programs, such as the lack of skilled craftsmen in the construction of uninhabitable homes, geographical conditions which are located on the seafront, the high cost of transportation in transporting materials, and lack of clarity in obtaining house assistance. not livable. It is hoped that the implementing party can further socialize what conditions must be met, how the procedure, how to submit it, in obtaining assistance for the House is not suitable for habitation.

Keywords: Implementation, Development, Unqualified Houses

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum. M.Pd., selaku Dekan Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.SI., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam.
4. Ibu Ulima Harma, S.AP.,M.A.P. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membimbing penulis serta memberikan arahan sampai selesai skripsi ini.
5. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.

6. Ibu Intan Nurmala S.E selaku Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Bulang.
7. Bapak Indra Hardono S.E selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bulang.
8. Bapak Zul'Aidi, SPD selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Bapak Daud S.E selaku Sekertaris Lurah Pulau Buluh Kecamatan Bulang.
10. Bapak Iwan S.E selaku Sekertaris Lurah Bulang Lintang Kecamatan Bulang
11. Kedua orang tua saya Bapak Mazlan dan Ibu Sulastri yang banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil,
12. Kepada adik-adik saya Melanda, Melinda, M.Zikri, M.Zufar yang memberikan dukungan kepada saya.
13. Kepada Kakek dan Nenek saya Bapak A.Razak dan Ibu Rohana yang selalu memberikan nasehat dan mendukung saya.
14. Kepada Tri Wahyudi yang selalu menemani dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.
15. Sahabat-sahabat saya khususnya, Yolanda Sari, Nikita, Egidia, Yuri, Khalida, Firman, Masfufata, ,Natalia , Agnesia Linda, Pepi, Rodiah, Nur, Siti.
16. Semua Teman-teman Prodi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam.
17. Semua Masyarakat yang menjadi narasumber dari penelitian saya.

Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, amin.

Batam, 14 Februari 2019

Yola Paramita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Dasar	8
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.1.2 Implementasi Kebijakan	9
2.1.3 Tahap-Tahap Proses Implementasi	11
2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan	11
2.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi	17
2.3 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi.....	18
2.4 Pengertian pembangunan	19
2.4.1 Teori-Teori Pembangunan	21
2.5 Rumah Tidak Layak Huni	23
2.5.1 Maksud Dan Tujuan Rumah Tidak Layak Huni.....	24
2.5.2 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Bantuan Rehabilitasi RTLH	25
2.6 Penelitian Terdahulu.....	27
2.7 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Sumber Data	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5. Teknik Analisa Data.....	37
3.6. Keabsahan Data.....	38
3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian	39
3.7.1. Lokasi Penelitian.....	39
3.7.2. Jadwal penelitian.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil penelitian.....	41
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.2. Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam.	47

4.1.3. Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Bulang.....	54
4.1.4. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan RTLH.....	58
4.2. Pembahasan	61
4.2.1. Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam.	61
4.2.2. Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Di Kecamatan Bulang.....	66
4.2.3. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak layak Huni Di Kecamatan Bulang.....	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PENDUKUNG PENELITIAN

LAMPIRAN 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bagan stuktur Organisasi Kecamatan Bulang...	43
Gambar 4.2 Kartu Indonesia Sehat	48
Gambar 4.3 Kartu Indonesia Pintar.....	49
Gambar 4.4 Surat Keterangan Tidak Mampu	49
Gambar 4.5 Rumah Tidak Layak Huni	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Jumlah Yang Mengajukan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ..	4
Tabel 1.2 Daftar Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.....	4
Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara.....	37
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bulang Tahun 2018	41
Tabel 4.2 Daftar Jumlah Yang Mengajukan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	58
Tabel 4.3 Daftar Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah adalah salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi, karena rumah merupakan kebutuhan hidup manusia selain sandang dan pangan dimana tempat manusia dapat berlindung. Rumah tidak hanya memiliki fungsi fisik yaitu sebagai tempat berlindung tetapi juga memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut, setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah yang layak huni, meskipun secara objektif belum seluruhnya keluarga dapat mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan hunian yang layak khususnya di daerah-daerah terpencil. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2005 pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulanagn Kemiskinan juga dikeluarkan dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulanagn Kemiskinan. Pada Pasal 3

disebutkan beberapa langkah diantaranya; (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, (4) menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Salah satu program unggulan dalam pegentasan kemiskinan adalah program Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) yang anggarannya dari APBD Kota Batam mengatakan bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan dan mengsucceskan kegiatan bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH).

Berdasarkan peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2017 Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, yang memiliki dinding dan atap dari bahan yang mudah rusak seperti papan, triplek bekas yang sudah lapuk, sehingga membahayakan penghuninya, maka dari itu rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjukkan fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan

keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan tercaai ketahanan keluarga.

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah menyiapkan anggaran sebesar RP 2,2 Miliar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang nantinya uang itu akan digunakan untuk merehabilitasi 100 Rumah Tidak Layak Huni baik di daerah hinterland maupun mainland. Tiap rumah akan dibantu dana sebesar RP 22 juta, tidak dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk bahan bangunan. Penerapan Rumah Tidak Layak Huni mengalami sedikit perubahan pada bahan bangunan yang akan digunakan nanti, jika sebelumnya program ini menggunakan kayu, tahun ini diganti dengan baja ringan. Tujuan pengantian bahan bangunan ini guna memudahkan pengerjaan nanti (Tribunnews April 2018). Rumah Tidak layak Huni ini sudah di selenggarakan di Kota Batam dari tahun 2013 baik di kota maupun di pulau terpencil, program RTLH yang di selenggarakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat sangat membantu warga masyarakat yang tidak mampu serta mempunyai Rumah Tidak Layak untuk di huni yang mengakibatkan ketidaknyamanan orang yang menempati rumah tersebut.

Kecamatan Bulang yang disertai Camat, Lurah, RW, RT melakukan studi lapangan guna mengetahui dan mendaftarkan jumlah warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni guna mendapatkan bantuan tempat yang layak atau rumah yang layak huni bagi kenyamanan anggota keluarga yang ada didalamnya.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Yang Mengajukan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2018

Nama Kelurahan	2017	2018
Bulang Lintang	63	30
Pulau Buluh	29	29

(Sumber : Kecamatan Bulang 2018)

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2018

Nama Kelurahan	2017	2018
Bulang Lintang	5	5
Pulau Buluh	4	6

(Sumber: Kecamatan Bulang 2018)

Dari daftar jumlah warga yang mengajukan bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Bulang Lintang pada tahun 2017 hanya sebanyak 5 buah rumah dan tahun 2018 hanya 5 buah rumah sedangkan di Pulau Buluh pada tahun 2017 hanya sebanyak 4 buah rumah dan 2018 hanya 6 buah rumah yang mendapatkan Rumah Tidak Layak Huni.

Kecamatan Bulang dengan luas wilayah 463Ha yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu pantai Gelam, Temoyong, Temoyong, Pulau Setokok, Batu Legong, Bulang Lintang dan pulau buluh ini juga memiliki kawasan perairan yang cukup luas, dengan jumlah penduduk sebanyak 10818 jiwa. Dalam permasalahan yang ada di Kecamatan Bulang selain mayoritas penduduk atau kepala keluarganya adalah nelayan ada lagi permasalahan yang cukup menjadi perhatian bagi pemerintah yaitu minimnya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Bulang. Dengan kondisi Rumah Yang Tidak Layak Huni bukan saja mengakibatkan ketidaknyamanan penghuni rumah tetapi juga bisa membahayakan keselamatan jika sewaktu-waktu terjadi hujan dan angin kencang yang mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan yang sudah tidak layak huni.

Dari permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Rumah Tidak Layak Huni yang hanya memfokuskan dua Kelurahan saja yaitu Kelurahan Pulau Bulauh dan Kelurahan Bualang Lintang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Abas dalam jurnal yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa tingkat kecukupan Rumah Layak Huni hanya 52.89 persen (kurang sesuai/berhasil), ditinjau dari standar pelayanan minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pencapaian kecukupan yang rendah atau kurang berhasil atau sesuai ini diakibatkan beberapa faktor, antara lain adalah akibat pembangunan Rumah layak Huni yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang/tidak berpedoman pada kriteria atau standar yang telah ditetapkan dalam Standar pelayanan Minimum (SPM) Rumah Tidak Layak Huni tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, misalnya saja soal ukurang luas rumah Tidak layak Huni yang dibangun adalah ukuran 30 m², seharusnya ukuran luas dapat diperbesar menjadi 36 m² atau sesuai jumlah penghuninya (minimal 7,2 m²/jiwa) (Abbas, 2015:80).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas sosial Dan**

Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam (Studi Kasus Di Kecamatan Bulang)”. Bulang)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan bulang ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi proses pembangunan Rumah Tidak layak Huni di Keceamatan Bulang ?
3. Apa saja faktor pendukung untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bulang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi proses pembanguna Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bulang ?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi program pembangunan Rumah Tidak layak Huni di Kecamatan Bulang ?
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam implementasi program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bulang ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademis, melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi atau memperdalam kajian terhadap ilmu administrasi

publik, khususnya dalam kajian administrasi pemerintah daerah dan pelayanan publik.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan, dapat memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran dalam membantu pelaksanaan program pembangunan Rumah Tidak layak Huni di Kecamatan Bulang agar terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi (Anggara, 2016:53) secara spesifik, yaitu meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan pada kebijakan sebelumnya, menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah, ketidak berhasilan implementasi suatu kebijakan disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mendapat perhatian khusus dari para ahli sehingga merupakan bagian dari kajian kebijakan publik.

Sedangkan Nakamura dan Smallwood dalam (Tahir Arifin, 2014:55) mengemukakan bahwa implementasi adalah “ (1) a declaration government preferences; (2) mediated by member of actors who; and (3) create a circular process characterized by reciprocal power relation and negotiation.” Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat pemerintah, tetapi ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2016:232) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Mulyadi, 2016:25).

Dalam arti yang seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang ingin dikehendaki (Wahab, 2012:133).

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas mempunyai makna pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan (Suntoro, 2015:79).

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa suatu impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. Realita menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks (Wahab, 2012:125-126). Studi implementasi, mau tidak mau akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan.

Tidak terimplementasinya suatu kebijakan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja seengah hati, atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau mungkin permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga betapa gigih pun usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi (Wahab, 2012:129).

2.1.3 Tahap-Tahap Proses Implementasi

Terdapat tahap-tahap dalam proses implementasi, yaitu mencakup (Anggara, 2016:269)

1. Output kebijakan badan pelaksana
2. Kesiapan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan
3. Dampak nyata output kebijakan
4. Dampak output kebijakan sebagaimana yang dipesepekan
5. Perbaikan mendasar dalam undang-undang

2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan

- a. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013:176-177) bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan Sasaran kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud. Jika didalam suatu kebijakan standar dan sasarannya tidak jelas, maka tidak akan bisa terjadi multi-intreprestasi dan mudah menimbulkan kesalah pahaman serta konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Menurut van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012:161) selain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan

perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber yang layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sumber-sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga menurut Van Meter dan Van Horn dalam adalah sumber daya finansial. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka memang menjadi persoalan politik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

3. Hubungan Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013:177), dalam program-program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan maka perlu adanya hubungan yang baik antar instansi terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang sangat utama dan penting dari sebuah organisasi demi terealisasinya program-program organisasi tersebut dengan tujuan serta sasarannya. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan

akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya (Agustino, 2008:144).

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013:177) suatu implementasi kebijakan, untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus didefinisikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, Ekonomi

Dalam (Suharno, 2013:177) kondisi lingkungan sosial, politik, ekonomi ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipasi yaitu mendukung atau menolak, serta sifar opini publik yang ada dilingkungan, serta apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementator

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013:177) dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementator dibedakan menjadi dua hal, yaitu :

- a. Respon implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik.

- b. Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang ditetapkan;
- c. Intens disposisi implementator, yakni prefensi nilai yang dimiliki tersebut.

b. Model Mazmian dan Sabatier

Menurut Mazmian dan sabatie dalam (Mulyadi, 2016:70) menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

1. Karakteristik dari masalah (*tracbility of the problems*), indikatornya :
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
 - a. Kejelasan isi kebijakan;
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut;
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksanaan;
 - e. Kejelasan dan konstitusi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;

g. Seberapa luas akses kelompo-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*), indikatornya;

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;

c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*);

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat implementator.

c. Model George C. Edward III

Selanjutnya *George C. Edward III* dalam (Mulyadi, 2016:68) mengemukakan 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdayanya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pemuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

2.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Implementasi suatu kebijakan, didalamnya akan selalu mengandung resiko untuk gagal. Disini, ukuran kegagalan implementasi tentunya dengan melihat kembali, apa sebenarnya dampak yang dipersepsikan oleh para pembuat kebijakan. Dari hal tersebut, maka dapatlah dikeukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktercapainya suatu tujuan implementasi (Suaib, 2016:85) ialah :

1. Sumber-sumber yang tersedia terbatas, yaitu termasuk tenaga, biaya material, waktu dan sebagainya;
2. Kesalahan dalam mengadministrasikan ;
3. Problem publik yang muncul, seringkali disebabkan oleh beberapa faktor.
4. Masyarakat dalam memberikan respon atau melaksanakan kebijakan negara, menurut cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau bahkan kehilangan dampak;
5. Adanya beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu dengan yang lain;
6. Usaha untuk memecahkan masalah tentu biayanya lebih besar dari masalah itu sendiri;
7. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan;
8. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan;

9. Adanya permasalahan baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang.

2.3 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara lain mengacu pada enam sumberdaya pokok manajemen menurut George R.Terry dalam (Mulyadi, 2015:27) :

- a. *Men (Human Resources)*, dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
- b. *Money (Finances)*, dalam manajemen publik, money sangat terikat dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
- c. *Material (logistik)*,
- d. *Machine (information)*, manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
- e. *Methods (Legitimate)*, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. *Market (Participation)*, partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berbentuk penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses dan implementasi kebijakan publik. Dikenal ada dua bentuk

partisipasi, yang pertama murni yang muncul secara spontan dari rakyat, kedua mobilisasi yaitu partisipasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu.

2.4 Pengertian pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan standar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka peminaan bangsa (Sondang, 2010). Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari suatu yang bersifat tanpa akhir, banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil yang diharapkan akan diperoleh.

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan dengan perkataan lain jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya sebagai pembangunan akan tetapi sebenarnya tidak diterapkan secara sadar dan hanya terjadi secara spontan, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. Strategi pembangunan daerah pada dasarnya disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal dari institusi atau daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2014:336). Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini

dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan.

Apabila definisi sederhana disama secara cermat, maka akan muncul permukaan paling sedikit tujuh ide pokok (Sondang, 2010:4) yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tiada akhir (*Never Ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadic atau incidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud sebagai kemampuan suatu negara bangsa untuk berkebang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya.
5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada

sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetap fleksibel.

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menanggungjawabkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
7. Semua hal yang telah disinggung diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara sbangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tingi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

2.4.1 Teori-Teori Pembangunan

Sebelum perang dunia kedua, dunia menganut pembagian kerja secara internasional. Menurut Budiman dalam (Listyaningsih, 2014:21) bukunya yang berjudul “Teori Pembangunan Dunia Ketiga”, teori pembagian kerja secara internasional pada dasarnya menyatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produk sesuai ketentuan komparatif yang diilikinya. Menurut Rowston dalam (Listyaningsih, 2014:24) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu masyarakat yang terbelakang terhadap masyarakat yang maju.

Proses ini dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukan merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini melainkan hanya berlangsung dipermukaan saja. Rowston dalam (Listyaningsih, 2014:24-25) membagi proses pembangunan ini menjadi lima tahap, antar lain yaitu :

1. Masyarakat tradisional dimana ilmu pengetahuan belum dikuasai, percaya pada ketentuan gaib dan tunduk pada alam. Masyarakat cenderung statis, artinya kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Produksi masih sangat terbatas dan digunakan untuk konsumsi serta tidak ada investasi.
2. Prakondisi untuk lepas landas pengaruh dan campur tangan dari luar masyarakat menggoncangkan masyarakat tradisional, dialaminya mulai berembang ide pembaharuan. Pada periode ini, usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat terjadi. Tabungan ini kemudian dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produksi yang menguntungkan. Segala usaha untuk meningkatkan produksi mulai bergerak dalam periode ini.
3. Lepas landas ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Sektor industri mulai berkembang pesat, keuntungannya sebagian besar ditanamkan pada pabrik yang baru.
4. Bergerak kekedewasaan 60 tahun sejak negara lepas landas, tingkat kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang

diproduksi. Dan yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang produksi, tetapi juga pada barang modal.

5. Jaman konsumsi masal yang tinggi akibat kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak terbatas kebutuhan pokok untuk hidup, akan tetapi meningkat kepada kebutuhan yang lebih tinggi.

2.5 Rumah Tidak Layak Huni

Rumah merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan. Kondisi rumah yang layak huni mencerminkan bahwa keluarga yang menempati rumah tersebut sejahtera tetapi bila rumah masyarakat masih banyak yang tidak layak unyuk ditempati berarti masyarakat daerah itu belum sejahtera. Rumah Tidak Layak Huni merupakan program dari pemerintah khususnya dari kantor desa dan kelurahan untuk member bantuan dana pembangunan rumah bagi masyarakat miskin. Budihardjo dalam (Wayan, 2015:108) mengemukakan bahwa salah satu permasalahan pada bidang perumahan dan pemukiman di Indonesia adalah kecilnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat tidak mampu, baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam (PERWAKO) Nomor 47 Tahun 2017 bahwa Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang secara fisik bangunanya tidak memenuhi standar dan tidak layak untuk dihuni secara struktur dan kesehatan. Sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas rumah tersebut

bertujuan untuk memulihkan kelayakan hunian rumah dari keselamatan struktur bangunan dan kesehatan penghuninya.

2.5.1 Maksud Dan Tujuan Rumah Tidak Layak Huni

Menurut Peraturan Walikota Batam (PERWAKO) Nomor 47 tahun 2017 pada pasal 2 bahwa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Bantuan Rehabilitasi RTLH dimaksudkan sebagai berikut:
 - a. Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak;
 - b. Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam pembangunan kawasan/lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar;
 - c. Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
 - d. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan; dan
 - e. Partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sesuai prinsip pemberdayaan.
- 2) Bantuan Rehabilitasi RTLH bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hidupnya secara mandiri berdasarkan sumberdaya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.

2.5.2 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Bantuan Rehabilitasi RTLH

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam (PERWAKO) Nomor 47 Tahun 2017 untuk mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni harus mengikuti/memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

- 1) Prosedur pengajuan bantuan rehabilitasi RTLH sebagai berikut :
 - a. Masyarakat mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi RTLH kepada lurah dengan melengkapi persyaratan;
 - b. Lurah melakukan verifikasi lapangan dan dapat mengikut sertakan LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat setempat;
 - c. Lurah menyampaikan usulan ke Dinas disertai daftar nama calon penerima bantuan yang sudah dilakukan verifikasi lapangan dan kelengkapan administrasi;
 - d. Dinas melalui tim penyelenggara meneliti permohonan dari lurah dan dilakukan verifikasi
 - e. Dinas melalui tim penyelenggara menyampaikan rekomendasi bantuan rehabilitasi RTLH kepada ketua tim koordinasi penanggulangan/pengentasan kemiskinan (TKPK); dan
 - f. Berdasarkan rekomendasi dari tim penyelenggaraan Walikota menetapkan nama-nama calon penerima bantuan menjadi penerima bantuan rehabilitasi RTLH.

- 2) Persyaratan pengajuan bantuan rehabilitasi RTLH
 - a. Mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi RTLH penerima bantuan yang dituangkan dalam suratpernyataan penenrma bantuan;
 - b. Berdomisili di kelurahan pelaksanaan program yang dibuktikan dengan KTP, KK/identitas diri yang masih berlaku;
 - c. Dinding rumah dalam keadaan rsak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
 - d. Atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tahan lama;
 - e. Lantai rumah terbuat dari tanah atau baha lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan dan keamanan penghuninya;
 - f. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
 - g. Tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus;
 - h. Foto kondisi rumah saat diverifikasi
 - i. Rumah yang akan direhabilitas merupakan rumah utama/induk yang merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan ditempati atas nama satu kepala keluarga yang terdapat dalam surat pernyataan;
 - j. Memiliki keluarga/sudah berkeluarga/diprioritaskan yang terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT)/memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Peserta Program Keluarga Harapan PKH);

- k. Surat pernyataan lahan/kavling /rumah milik sendiri/bukan lahan developer diketahui oleh lurah setempat;
 - l. Bukan yang diusulkan kepada kementerian perumahan rakyat atau pernah mendapatkan bantuan dari instansi tersebut; dan
 - m. Prioritas untuk rumah-rumah penduduk miskin yang berada di tepi laut/pesisir pantai/pulau-pulau di Kota Batam dalam bentuk surat keterangan RT/RW.
- 3) Rincian prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyo Mudji, 2013) Volume 2 ISSN:2252-4266. Dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara” Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah prosedur pelayanan; waktu penyelesaian; biaya pelayanan produk petugas pemberi pelayanan yang kompeten.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wayan, 2015) Volume 2 ISSN 2337-3067. Dengan judul “Peran Dana Bantuan Sosial Terhadap kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah Di kabupaten Buleleng” Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis persepsi masyarakat penerima bantuan bedah rumah tentang keberadaan program ini, 2) untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin sebelum dan sesudah menerima bantuan program bedah rumah, 3) untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah dalam pelaksanaan program bedah rumah, 4) untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam program bedah rumah di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) persepsi masyarakat miskin penerima bantuan terhadap keberadaan program bedah rumah sebagian besar memberikan pernyataan positif (Setuju dan Sangat Setuju), sisanya memberikan pernyataan netral, dan pernyataan negatif (Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju). 2) Terdapat peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin setelah menerima bantuan bedah rumah. 3) Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah verifikasi, penjangangan, sosialisasi, dan pembangunan. 4) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah menyiapkan konsultan pendamping, menyerahkan pelaku utama dalam program bedah rumah

kepada masyarakat desa/kelurahan, dan perlu disusun standar baku dari calon penerima bantuan.

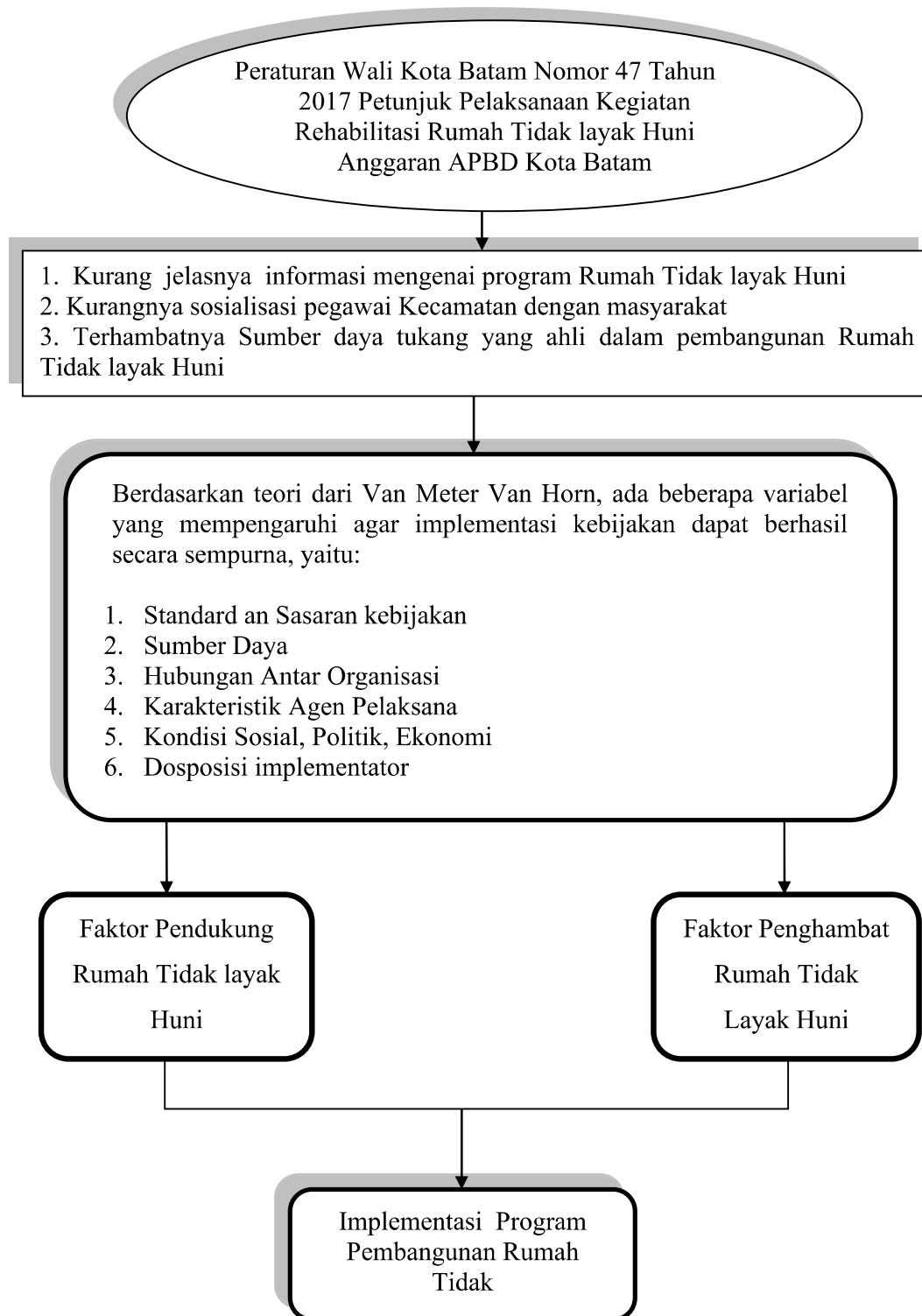
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Bambang Winarno, 2018) Volume 16, Nomor 01, ISSN 2337-7062. Dengan judul “ Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupatn Belitung”. Permasalahan pemenuhan rumah bagi masyarakat miskin merupakan hal rumit karena faktor ekonomi, kurangnya partisipasi pengembang dalam penyediaan rumah, tidak menarik dari sisi bisnis, dan ketidakmampuan berusaha karena usia penghuni. Pemerintah sebagai fasilitator penyediaan perumahan yang layak huni bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga muncul pertanyaan bagaimana penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin? Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Belitung. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian sasaran program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui penjelasan suatu fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2018), Volume 03, Nomor 1, ISSN 2548-1363. Dengan Judul “Implementasi Program bantuan Sosial Pemugaran rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Ngotet KAB, Rembang Tahun 2017”. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi

ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi dua puluh satu dari tiga puluh empat provinsi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3,90 juta penduduk atau sebesar 11,32%. Dengan kondisi tersebut, saat ini terdapat lima belas kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan (Zona Merah) salah satunya adalah Kabupaten Rembang dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 115,19 ribu atau sebesar 18,35% dari seluruh jumlah penduduk. Tingginya persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Rembang tersebut mencerminkan masih banyaknya rumah penduduk yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 mulai melaksanakan Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi penduduk miskin. Program tersebut salah satunya dilaksanakan di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Namun dalam pelaksanaannya, masih dinilai kurang tepat sasaran dikarenakan terdapat beberapa kriteria yang tidak dilaksanakan dalam menentukan masyarakat atau kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Hasil penelitian menggunakan teori implementasi George C. Edwards III dengan fokus pada internal organisasi, terdapat beberapa indikator yang masih harus diperbaiki yaitu komunikasi yang berfokus pada konsistensi pelaksanaan; sumber daya baik dari sisi manusia dan anggaran; disposisi yaitu

pengangkatan birokrasi dan insentif. Adapun yang sudah berjalan baik yaitu struktur birokrasi pada sisi mekanisme dan struktur birokrasi di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadinata et al., 2018), Volume 4, Nomor 2, ISSN 2550-1143. Dengan judul “pemanfaatan Media informasi Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Desa Parakan memiliki program pembangunan berupa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah Pusat. Rumah Tidak Layak Huni adalah hunian atau rumah tinggal yang tidak layak huni disebabkan oleh tidak cukup persyaratan baik teknis dan non teknis sebagai rumah untuk dihuni. Dalam menjalankan program ini tentunya Desa Parakan membutuhkan media informasi sebagai penunjang komunikasi desa yang efektif agar program RTLH berlangsung baik. Namun pada realitasnya di desa parakan pemanfaatan media komunikasi belum menjadi sarana utama dalam menginformasikan kegiatan desa secara keseluruhan. Temuan dari penelitian ini adalah karakteristik media informasi dimanfaatkan oleh Desa Parakan cenderung arus pesannya dua arah, melakukankomunikasi secara langsung. Menggunakan surat sebagai media informasinya, sementara itu komunikasi tidak langsung Desa Parakan menggunakan Mading, pamflet, Banner, dan juga menggunakan teknologi seperti Whatsup, Website, Blog, Facebook. Sementara itu Sumberdaya Manusia, Media Informasi serta Dimensi Budaya menjadi pemicu yang mempengaruhi dalam penyampaian informasi RTLH.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih mengarah kepada mendeskripsikan dan menganalisis suatu persoalan atau masalah. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini terjadi dan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada. Sebagaimana yang dimaksud penelitian kualitatif (Sugiono, 2016:9) adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari para generalisasi. Dalam Sugiyono (2010:19-20) berikut proses penelitian kualitatif:

1. Tahap orientasi atau deskripsi, dengan *grand tour question*. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.
2. Tahap reduksi/fokus. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru, data yang dirasa tidak pakai akan disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

maka data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

3. Tahap *selection*. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.

3.2 Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Spradley mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus yaitu, (Sugiono, 2016:207-209):

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pertemuan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang teori-teorinya telah ada.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dengan variabel-variabel yang terdapat dalam Model donal S. Van Meter dan Carl

E. Van Horn yang meliputi :

- a. Standar sasaran kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakteristik agen pelaksanaan
- e. Kondisi lingkungan sosial, politik, ekonomi
- f. Disposisi implementor

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu (Sugiono, 2016):

1. Data primer, berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai kecamatan Bulang, kelurahan dan masyarakat.
2. Data sekunder, berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku dan website yang berisi teori dan dokumen dan tulisan mengenai bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview* dan dokumentasi) (Sugyono, 2016:224-225).

Dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut (Gunawan, 2013:141):

- a. Observasi, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Dimana peneliti langsung datang ke kantor Kecamatan Bulang.
- b. Wawancara mendalam, merupakan teknik dimana peneliti dan informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung maupun melalui telepon dengan informann dari kepala bidang program rumah tidak layak huni dan masyarakat, maupun dari pihak luar terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari wawancara ini adalah unntuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pegawai yang ada di Kecamatan Bulang, Pegawai di kelurahan Pulau Buluh dan Bulang Lintang, serta masyarakat. Berikut adalah daftar informan yang berpartisipasi dalam wawancara yang penulis lakukan, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Intan	Kepala Sub Bagian Umum
2.	Zul Aldi	Kepala Seksi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
3.	Indra	Kepala Seksi Kesejahteraan rakyat
4.	Daud	Sekretaris Lurah Pulau Buluh
5.	Iwan	Sekretaris Lurah Bulang Lintah
6.	Ambar	Pegawai
7.	Mustakin	Masyarakat
8.	Ramli	Masyarakat
9.	Afrizal	Masyarakat
10.	Awang	Masyarakat

(Sumber: Hasil Observasi penelitian 2019)

- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen ini berupa sumber data penelliti seperti dalam bentuk tulisan, gambar atau foto tujuannya agar hasil penelitian ini bisa dikatakan lebih akurat.

3.5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan analisi data kualitatif menggunakan konsep Miles dan Huberman dalam (Sugiono, 2016:246) yang dikenall dengan model interaktif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Analisis data dilakukan dengan tahap:

- a. Reduksi data. Data yang diperoleh dilokasi penelitian atau daa lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Untuk perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
- b. Penyajian data, dengan penyajian data ini, data yang dikumpulkan jad terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga dapat lebih mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, yaitu melakukan verifikasi data secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung didukung dengan bukti-bukti yang valid.

3.6. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk menjamin derajat kepercayaan atau keberadaan, maka penelitian memakai uji keabsahan data sebagai berikut (Sugiono, 2016:270):

1. Uji kredibilitas, kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan :
 - a. Perpanjang pegamatan berarti penelitian kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun ang baru.

- b. Mengingat ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan uraian peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
 - c. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
 - d. Mengadakan membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
2. Uji *Transferability*, dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat di percaya.
 3. Uji *Dependability*, melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
 4. Uji *Konfirmability*, hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif uji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di kantor Kecamatan Bulang, Jalan Temenggung Abdul Jamal, Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang. Dengan hanya meneliti di dua Kelurahan saja yaitu, Kelurahan Pulau Buluh dan Kelurahan Bulang Lintang. Karena akses ke Kelurahan tersebut mudah di jangkau.

